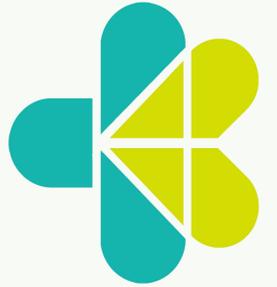


Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Prostitusi Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif *Rational Choice Theory*

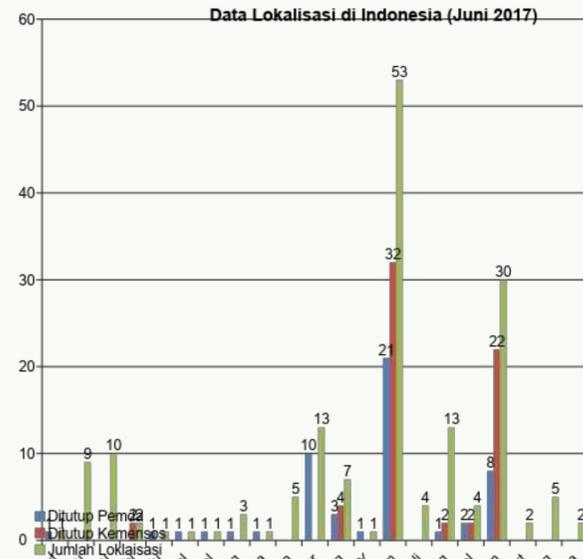
Aryo Ginanjar

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKKMK Universitas Gadjah Mada
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian kesehatan RI



OBJECTIVE

Patut di apresiasi bahwa penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia menjadi kebijakan strategis yang diambil pemerintah dalam menghapus prostitusi. Menurut data Kemensos, dalam kurun waktu 4 tahun (2013-2107) sudah ditutup sebanyak 118 lokalisasi dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia. Sisanya ditargetkan sampai tahun 2019 seluruh lokalisasi prostitusi akan ditutup(1).



Gambar 1. Data lokalisasi di Indonesia Tahun 2017. Sumber Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kemensos 2018

Kemudian bagaimana nasib para Pekerja Seks Komersial (PSK)? Apakah mereka berhenti menjadi PSK dan mencari pekerjaan lain?

Upaya ini ternyata belum menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru pasca penutupan(2). Tidak mudah untuk melakukan rehabilitasi prostitusi untuk mengubah perilaku dari para PSK dan berbagai pihak yang bergantung kepadanya menjadi perilaku yang tidak melanggar moral dan hukum.

Pendekatan persuasif, langkah antisipasi dan pemberdayaan masyarakat sudah pasti telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampai sekarang belum dapat mengatasi keseluruhan masalah yang muncul setelah kebijakan penutupan lokalisasi ini diterapkan(3).

Tujuan kajian ini adalah mengungkap fenomena penutupan lokalisasi prostitusi dari sudut pandang sebuah teori yaitu *Rational Choice Theory*. Batasan masalah difokuskan kepada PSK yang ternyata tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penaja seks secara tersembunyi, tersebar dan terselubung, serta bagaimana dampak dari hal tersebut.

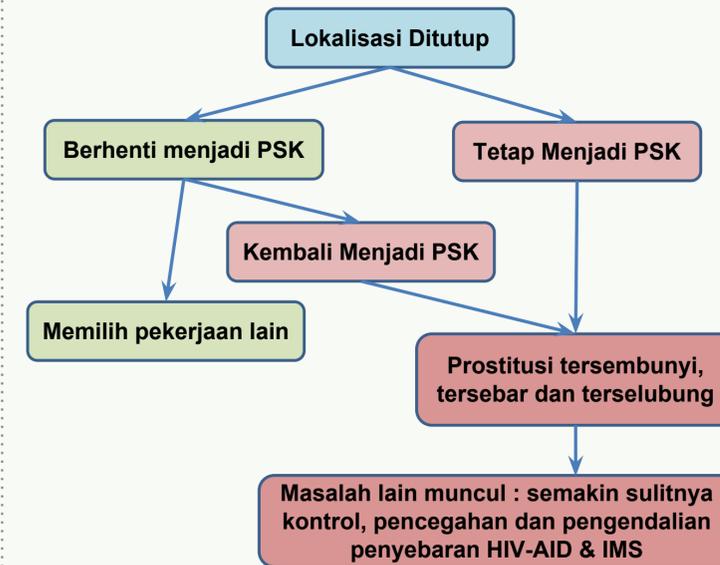
METHODS

Kajian ini merupakan *literature review* dari berbagai hasil penelitian terkait fenomena penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia, didukung dengan data sekunder, dan dianalisis menggunakan pendekatan *Rational Choice Theory* untuk mengungkapkan penyebab masalah yang muncul pasca penutupan lokalisasi.

RESULTS

Rational Choice Theory adalah pendekatan yang melihat bagaimana individu melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan *self interest* dan maksimasi kepentingan. Bila dihadapkan dengan dua atau lebih pilihan, maka individu akan mengambil pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya(4).

Pada sudut pandang PSK, penulis menemukan kurang lebih sebanyak 41 hasil penelitian di Indonesia yang dipublikasikan dalam artikel di berbagai jurnal yang menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama yang menyebabkan PSK tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penaja seks.



Gambar 2. Bagan Masalah Pasca Penutupan Lokalisasi

Tetap menjadi PSK merupakan pilihan paling rasional, setidaknya bagi mereka sendiri, untuk mendapatkan uang dengan cara mudah yang bisa mereka lakukan (faktor ekonomi). Disinilah mereka menerapkan *Rational Choice Theory*.

Fenomena ini menimbulkan dampak lanjutan pada aspek kesehatan yaitu penyebaran HIV-AIDS dan penyakit menular seksual yang semakin sulit dikontrol. Upaya *screening* dan surveilans yang dilakukan Dinas Kesehatan dan jaringannya menjadi semakin berat(5,6). Hal ini berpotensi menimbulkan ledakan kasus bila tidak segera ditangani secara tepat oleh semua pihak.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap eks-PSK belum menunjukkan hasil yang efektif karena perencanaan yang kurang matang sehingga tidak menjamin keberlanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan.

CONCLUSIONS

Ada beberapa rekomendasi yang penulis sarankan sebagai berikut :

1. Penutupan lokalisasi harus direncanakan secara matang terutama pada upaya mengatasi masalah pasca penutupan. Bila tidak, lebih baik menunda untuk melakukan penutupan mengingat dampak yang akan muncul setelahnya.
2. Pendampingan terhadap eks-PSK harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sampai dengan munculnya kemandirian secara ekonomi tanpa harus menjadi PSK kembali. Komitmen dari pemerintah dan pihak terkait harus konsisten, termasuk dalam anggaran untuk program-program pasca penutupan lokalisasi.
3. Sektor swasta perlu dilibatkan dalam penyediaan lapangan kerja, selain itu pemberian pinjaman modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi alternatif upaya yang dapat dilakukan.
4. Konseling dan bimbingan mengenai perubahan perilaku, nilai moral dan keagamaan menjadi upaya pendukung bagi para eks-PSK dalam memperbaiki kualitas hidupnya.
5. Regulasi mengenai larangan prostitusi dan penegakan hukum yang tegas di setiap daerah.

BIBLIOGRAPHY

- (1) Kemensos. (2018). *Data Lokalisasi Prostitusi Di Indonesia Tahun 2018*, Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang, Kemensos RI.
- (2) Koesbardiati, T., Endah Kinasih, S. and Mas'udah, S. (2017), "Integrating the Roles of Stakeholders in Preventing the Hiv/Aids Transmission in East Java, Indonesia", *Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease*, Vol. 6 No. 5, p. 124.
- (3) Nugroho, B.P. (2017), "Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly Melalui Pengembangan Wirausaha Oleh Pemerintah Kota Surabaya", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 5, pp. 1-11.
- (4) Rafael Wittek, Tom Snijder, V.N. (2013), *The Handbook of Rational Choice Social Research*, Stanford Social Sciences, Stanford University Press, California, available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- (5) Rianor, A., Puadi, A., Qomaruddin, M.B., Masyarakat, F.K. and Airlangga, U. (2016), "Peran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Dalam Penanggulangan HIV & AIDS Di Kabupaten Kotawaringin Timur", *Jurnal Promkes*, Vol. Vol. 4, pp. 117-128.
- (6) Rokhmah, D., Masyarakat, F.K., Jember, U. and Timur, J. (2015), "Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi Untuk Pekerja Seks Komersial Dan Penutupan Prostitusi Terhadap Program Penanggulangan Hiv Aids Di Kabupaten Jember", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 03 No. 02, pp. 75-81.